

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat, dengan Kota Bandung sebagai ibu kotanya merupakan salah satu wilayah administratif di Indonesia. Sebagai provinsi pertama yang dibentuk di tanah air, keberadaannya didasarkan pada Staatblad Nomor 378, dengan landasan hukum lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950. Jawa Barat juga dikenal sebagai provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia. Terletak strategis di bagian barat laut, wilayah ini berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibu kota negara.

Pembagian wilayah di Pulau Jawa pada era Hindia Belanda memiliki dasar strategis yang berorientasi pada kebutuhan militer, khususnya untuk menghadapi Perang Diponegoro (1825-1830). Pada masa itu, Pulau Jawa dibagi menjadi tiga zona militer: Jawa Barat (*west java*) sebagai Daerah Militer I, Jawa Tengah (*midden java*) sebagai Daerah Militer II, dan Jawa Timur (*oost java*) sebagai Daerah Militer III. Namun, sebelum pembagian tersebut, wilayah Jawa Barat (kecuali Kesultanan Banten) telah berada di bawah kendali VOC sejak 1706. Hal ini merupakan bagian dari kompensasi atas kekalahan Kerajaan Mataram dalam perang melawan Trunojoyo. Batas-batas wilayah saat itu mencakup Sungai Cilosari di bagian utara dan Sungai Cidonan di bagian selatan. Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811) kemudian memperluas batas selatan ke arah barat hingga mencapai Sungai Citanduy.

Pada tahun 1816, istilah "*West Java*" belum dikenal. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Alfred Russel Wallace pada tahun 1861 melalui bukunya yang mendokumentasikan perjalanan di Nusantara, termasuk Pulau Jawa, dan menyebut "*West Java*" sebanyak dua kali. Selanjutnya, istilah tersebut semakin populer setelah diterbitkannya buku berjudul *West Java* karya S. Coolsma pada tahun 1879, yang membahas pembagian Pulau Jawa menjadi dua wilayah, yaitu "*West Java*" dan "*Oost Java*," dengan batas alami di Sungai Cilosari dan Sungai Citanduy. Penggunaan resmi istilah "*West Java*" baru terjadi pada tahun 1925, saat wilayah ini ditetapkan sebagai satu kesatuan administrasi provinsi, yaitu *Provincie West Java*, yang mencakup Banten, Batavia, Priangan, dan Cirebon.

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), struktur administrasi ini dihapuskan. Namun, setelah Indonesia merdeka, sistem pemerintahan provinsi kembali diresmikan melalui Sidang PPKI pada 19 Agustus 1945, yang menetapkan Jawa Barat sebagai salah satu dari delapan provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada tahun 1964, wilayah Jawa Barat berkurang ketika Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mendapatkan status provinsi. Pemekaran kembali terjadi pada 4 Oktober 2000 dengan pembentukan Provinsi Banten, yang meliputi Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon.

Dalam lima dekade pertama setelah pembentukannya, jumlah wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat bertambah sebanyak lima: Kabupaten Subang pada 1968, Kota Tangerang pada 1993, Kota Bekasi pada 1996, serta Kota Cilegon dan Kota Depok pada 1999. Pada tahun yang sama, Kota Depok memperoleh status kota otonom, mengurangi jumlah kota

administratif dari enam menjadi empat. Selain itu, antara 1994 hingga 1999, wilayah pembantu gubernur tetap berjumlah lima, mencakup 20 kabupaten dan lima kotamadya, sebelum meningkat menjadi delapan kotamadya pada akhir periode tersebut.

Jawa Barat merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi besar dalam berbagai bidang, seperti pengelolaan sumber daya air, pemanfaatan lahan, hutan, serta pesisir dan laut. Dikenal dengan keindahan alamnya, Jawa Barat juga terus mengalami perkembangan signifikan di sektor pemerintahan, ekonomi, dan sosial masyarakat, yang menjadi daya tarik serta kekuatan strategis bagi provinsi ini.

2.2 Kondisi Kewilayahan Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat terletak di bagian barat Pulau Jawa, dengan koordinat astronomis antara 5°50' - 7°50' Lintang Selatan dan 104°48' - 108°48' Bujur Timur. Luas wilayah yang dimiliki Jawa Barat yaitu mencapai 35.377,76 km² dengan wilayah administratif yang terbagi atas 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten dan 9 kotamadya dengan 627 kecamatan, 645 kelurahan, serta 5.312 desa. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH (Km ²)	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
1	Kab. Bogor	2.710,62	40	19	416
2	Kab. Sukabumi	4.145,70	47	5	381
3	Kab. Cianjur	1.840,16	32	6	354
4	Kab. Bandung	1.767,96	31	10	270
5	Kab. Garut	3.074,07	42	21	421
6	Kab. Tasikmalaya	2.551,19	39	-	351
7	Kab. Ciamis	1.414,71	26	7	258

8	Kab. Kuningan	1.110,56	32	15	361
9	Kab. Cirebon	984,52	40	12	412
10	Kab. Majalengka	1.204,24	26	13	330
11	Kab. Sumedang	1.518,33	26	7	270
12	Kab. Indramayu	2.040,11	31	8	309
13	Kab. Subang	1.893,95	30	8	245
14	Kab. Purwakarta	825,74	17	9	183
15	Kab. Karawang	1.652,74	30	12	297
16	Kab. Bekasi	1.224,88	23	7	180
17	Kab. Bandung Barat	1.305,77	16	-	165
18	Kab. Pangandaran	1.010,00	10	-	93
19	Kota Bogor	118,50	6	68	-
20	Kota Sukabumi	48,25	7	33	-
21	Kota Bandung	167,67	30	151	-
22	Kota Cirebon	37,36	5	22	-
23	Kota Bekasi	206,61	12	56	-
24	Kota Depok	200,29	11	63	-
25	Kota Cimahi	39,27	3	15	-
26	Kota Tasikmalaya	171,61	10	69	-
27	Kota Banjar	113,49	4	9	16
	JAWA BARAT	35.377,76	627	645	5.312

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018)

Provinsi Jawa Barat terletak di bagian selatan dan tengah pegunungan sertadataran rendah pada bagian utara. Adapun, batas-batas dari wilayah Provinsi Jawa Barat sendiri, antara lain:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.
- Sebelan Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda.

Gambar 2.1 Peta Provinsi Jawa Barat



(Sumber: Peta Jawa Barat dalam Jabarprov).

Posisi geografis Jawa Barat yang strategis memberikan keuntungan yang signifikan bagi daerah ini, terutama dalam aspek komunikasi dan transportasi yang mendukung perkembangan ekonomi dan mobilitas penduduk. Wilayah utara provinsi ini didominasi oleh dataran rendah yang memfasilitasi kegiatan pertanian dan pemukiman, sementara daerah selatan memiliki topografi berbukit dengan beberapa pantai yang menyuguhkan pemandangan indah dan potensi pariwisata. Di tengah provinsi, terdapat dataran tinggi yang bergunung-gunung, membentuk rangkaian pegunungan yang membentang dari barat hingga timur Pulau Jawa. Gunung Ciremai, yang terletak di barat daya Kota Cirebon, merupakan titik tertinggi di wilayah ini dan menjadi ikon keindahan alam Jawa Barat.

Provinsi ini juga dilengkapi dengan sungai-sungai penting seperti Sungai Citarum dan Sungai Cimanuk, yang berperan vital dalam sistem irigasi dan penyediaan air bagi

masyarakat, serta bermuara di Laut Jawa. Iklim tropis yang meliputi Jawa Barat ditandai oleh curah hujan yang tinggi dan frekuensi hari hujan yang banyak, menciptakan lingkungan yang subur bagi pertumbuhan berbagai jenis tanaman. Keberadaan lahan yang subur, yang berasal dari endapan vulkanis, serta melimpahnya aliran sungai mendukung sebagian besar penggunaan tanah di provinsi ini untuk kegiatan pertanian. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan lokal tetapi juga pada perekonomian daerah yang bergantung pada sektor pertanian sebagai salah satu sumber penghidupan utama masyarakat.

2.3 Provinsi Jawa Barat dalam Catatan Statistik

2.3.1 Keadaan Demografis

Pada tahun 2018, jumlah penduduk di Jawa Barat diperkirakan mencapai 48,68 juta jiwa, menjadikannya sebagai provinsi dengan populasi terbanyak di Indonesia. Komposisi penduduk terdiri dari 24,65 juta jiwa laki-laki dan 24,03 juta jiwa perempuan, menghasilkan *sex ratio* sebesar 102,59. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar 102 hingga 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di provinsi tersebut.

Dari perspektif kabupaten dan kota, Kabupaten Indramayu mencatat rasio jenis kelamin tertinggi, yaitu 106,15, sedangkan Kota Banjar memiliki rasio terendah dengan nilai 97,39. Mayoritas kabupaten dan kota di Jawa Barat menunjukkan angka rasio jenis kelamin di atas 100, yang mengindikasikan dominasi jumlah penduduk laki-laki. Namun, terdapat enam kabupaten yang memiliki *sex ratio* di bawah 100, yaitu Kabupaten Ciamis, Pangandaran, Tasikmalaya, Majalengka, Sumedang, dan

Kota Banjar. Fenomena ini mencerminkan perbedaan demografis yang signifikan di antara wilayah-wilayah di Jawa Barat, yang dapat berimplikasi pada kebijakan sosial, ekonomi, dan perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Kabupaten Bogor tercatat memiliki jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak 5,84 juta jiwa (12 persen). Setelahnya, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bekasi masing-masing memiliki populasi sebesar 3,73 juta jiwa dan 3,63 juta jiwa. Sebaliknya, wilayah dengan populasi terkecil adalah Kota Banjar, yang dihuni oleh 182,86 ribu jiwa. Keberagaman jumlah penduduk di setiap Kabupaten/Kota ini menunjukkan variasi yang signifikan dalam distribusi populasi di Provinsi Jawa Barat.

Sekitar 72,5 persen penduduk Jawa Barat tinggal di daerah perkotaan, yang dipengaruhi oleh industrialisasi dan urbanisasi. Wilayah penyangga Ibukota, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, yang terbagi ke dalam lima wilayah administrasi, menyumbang sekitar sepertiga dari total populasi Jawa Barat atau sebesar 32,52 persen.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS KELAMIN		JUMLAH	SEX RATION
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	Kab. Bogor	2.920.288	2.794.721	5.715.009	104,49
2	Kab. Sukabumi	1.243.192	1.210.306	2.453.498	102,72
3	Kab.cianjur	1.160.520	1.096.069	2.256.589	105,88
4	Kab. Bandung	1.853.615	1.803.986	3.657.601	102,75
5	Kab. Garut	1.303.638	1.285.201	2.588.839	101,43
6	Kab Tasikmalaya	865.471	881.847	1.747.318	98,14

7	Kab. Ciamis	584.228	597.693	1.181.981	97,76
8	Kab. Kuningan	537.106	531.095	1.068.201	101,13
9	Kab. Cirebon	1.106.997	1.052.580	2.159.577	105,17
10	Kab. Majalengka	596.630	597.095	1.193.725	99,92
11	Kab. Sumedang	570.808	575.627	1.146.435	99,16
12	Kab. Indramayu	880.619	829.375	1.709.994	106,18
13	Kab. Subang	789.211	773.298	1.562.509	102,96
14	Kab. Purwakarta	479.713	463.624	943.337	103,47
15	Kab. Karawang	1.187.274	1.129.215	2.316.489	105,14
16	Kab. Bekasi	1.782.205	1.717.818	3.500.023	103,75
17	Kab. Bandung Barat	845.477	821.033	1.666.510	102,98
18	Kab. Pangandaran	196.827	198.271	395.098	99,27
19	Kota. Bogor	548.196	522.813	1.081.009	102,89
20	Kota Sukabumi	163.891	159.897	323.788	102,50
21	Kota Bandung	1.260.204	1.237.734	2.497.938	101,82
22	Kota. Cirebon	157.103	156.222	313.325	100,56
23	Kota Bekasi	1.441.137	1.418.493	2.859.630	101,60
24	Kota Depok	1.135.539	1.118.974	2.254.513	101,48
25	Kota Cimahi	302.703	298.396	601.099	101,44
26	Kota Tasikmalaya	332.579	328.825	661.404	101,14
27	Kota Banjar	90.100	92.288	182.388	97,63
	JAWA BARAT	24.335.331	23.702.496	48.684.721	102,67

(Sumber : Jawa Barat Dalam Angka, 2019)

Berdasarkan data dalam tabel 2.2, Kabupaten Bogor tercatat memiliki jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak 5,7 juta jiwa pada tahun 2018. Posisi berikutnya ditempati oleh Kabupaten Bandung, dengan populasi mencapai 3,6 juta jiwa, menjadikannya kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak kedua. Selanjutnya, Kabupaten Bekasi berada di urutan ketiga dengan populasi sebesar 3,5 juta jiwa, diikuti oleh Kota Bekasi dengan 2,8 juta jiwa di urutan keempat, dan Kota Bandung dengan 2,4 juta jiwa di peringkat kelima.

Sementara itu, Tabel 2.2 menunjukkan bahwa Kota Banjar merupakan wilayah dengan populasi terkecil di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018, yaitu sebanyak 182 ribu jiwa. Kota Cirebon berada di urutan kedua dengan jumlah penduduk 313 ribu jiwa, diikuti oleh Kota Sukabumi dengan populasi 323 ribu jiwa. Kota Cimahi dan Kota Tasikmalaya menempati urutan keempat dan kelima dalam kategori wilayah dengan jumlah penduduk terkecil, masing-masing dengan 601 ribu jiwa dan 661 ribu jiwa.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA I/II/III/AKADEMI UNIVERSITAS	
1	Kab. Bogor	655.687	536.631	962.973	212.682	2.611.465
2	Kab. Sukabumi	480.975	204.511	243.492	46.025	1.114.171
3	Kab. Cianjur	431.985	187.752	195.690	64.819	980.827
4	Kab. Bandung	410.457	439.383	529.007	191.285	1.658.601
5	Kab. Garut	376.110	240.749	256.022	77.127	1.095.981
6	Kab. Tasikmalaya	497.391	121.885	135.247	37.496	830.877
7	Kab. Ciamis	320.447	122.549	107.064	36.381	612.055
8	Kab. Kuningan	154.265	86.337	144.356	44.686	475.284
9	Kab. Cirebon	279.111	193.458	270.173	84.499	995.946
10	Kab. Majalengka	238.020	120.711	115.546	42.233	601.920
11	Kab. Sumedang	225.028	166.692	150.430	36.157	548.642
12	Kab. Indramayu	211.890	113.555	204.237	62.567	846.853
13	Kab. Subang	225.652	171.913	207.688	43.943	779.377
14	Kab. Purwakarta	120.227	76.130	151.729	34.163	438.911
15	Kab. Karawang	275.180	169.661	426.016	77.177	1.128.724
16	Kab. Bekasi	211.209	220.704	826.094	234.267	1.630.423
17	Kab. Bandung Barat	244.262	162.711	211.385	63.510	747.412
18	Kab. Pangandaran	111.584	53.288	51.134	16.664	240.175
19	Kota Bogor	93.670	80.509	224.932	80.650	522.170
20	Kota Sukabumi	31.485	24.150	59.806	23.435	145.158

21	Kota Bandung	202.286	232.491	479.643	260.710	1.204.451
22	Kota Cirebon	26.094	19.462	61.888	38.097	162.775
23	Kota Bekasi	175.108	207.755	565.562	445.920	1.458.231
24	Kota Depok	117.529	130.096	507.139	316.300	1.101.372
25	Kota Cimahi	44.565	62.937	136.729	45.493	297.539
26	Kota Tasikmalaya	121.225	52.437	69.575	52.493	308.343
27	Kota Banjar	29.102	21.587	26.731	8.311	90.439
	JAWA BARAT	6.310.544	4.170.044	7.320.288	2.677.090	22.628.122

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018)

Data pada Tabel 2.3 menunjukkan distribusi penduduk Provinsi Jawa Barat berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Secara keseluruhan, jumlah penduduk dengan pendidikan SD mendominasi, yaitu sebanyak 6.310.544 jiwa, diikuti oleh tingkat pendidikan SMA dengan 7.320.288 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan Diploma I/II/III mencapai 2.677.090 jiwa, dan yang memiliki gelar universitas sebanyak 22.628.122 jiwa.

Kabupaten Bogor menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak pada hampir semua jenjang pendidikan, terutama pada kategori universitas yang mencapai 2.611.465 jiwa. Sebaliknya, Kota Banjar memiliki jumlah penduduk terendah pada semua kategori, dengan jumlah penduduk lulusan universitas hanya sebanyak 8.311 jiwa. Kota Bandung dan Kota Bekasi juga mencatat jumlah penduduk yang signifikan di tingkat pendidikan tinggi (universitas), masing-masing sebanyak 1.204.451 dan 1.458.231 jiwa. Sementara itu, Kabupaten Pangandaran memiliki jumlah penduduk yang relatif kecil pada semua tingkat pendidikan, terutama untuk kategori Diploma I/II/III, yakni 16.664 jiwa.

Distribusi ini mencerminkan pola disparitas pendidikan di Provinsi Jawa Barat, di mana kota-kota besar seperti Bandung, Bekasi, dan Bogor cenderung memiliki populasi lebih besar yang menyelesaikan pendidikan tinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lebih kecil atau wilayah rural. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pemerataan akses pendidikan, terutama untuk jenjang diploma dan universitas, menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan.

2.3.2 PNS Jawa Barat dalam Angka 2018

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di setiap daerah, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat memiliki kebutuhan yang signifikan akan tenaga administrasi dan pelayanan pemerintahan yang kompeten. Keberadaan PNS di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat menjadi tulang punggung dalam memastikan jalannya pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan efisien. Pada tahun 2018, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak 315.980 orang, dengan 153.933 di antaranya adalah laki-laki dan 162.047 perempuan.

**Tabel 2.4 Jumlah PNS menurut Kab/Kota
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018**

NO	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kab. Bogor	8.619	8.667	17.286
2	Kab. Sukabumi	7.158	5.277	12.435
3	Kab. Cianjur	6.310	5.920	12.230
4	Kab. Bandung	5.486	6.460	11.946
5	Kab. Garut	5.833	5.687	11.520
6	Kab. Tasikmalaya	3.745	4.169	7.914
7	Kab. Ciamis	6.125	5.962	12.087
8	Kab. Kuningan	7.392	9.929	17.321
9	Kab. Cirebon	5.121	5.833	10.954
10	Kab. Majalengka	7.918	8.031	15.949
11	Kab. Sumedang	5.848	6.702	12.550
12	Kab. Indramayu	4.687	5.492	10.179
13	Kab. Subang	6.489	6.858	13.347
14	Kab. Purwakarta	5.794	5.672	11.466
15	Kab. Karawang	6.609	5.253	11.862
16	Kab. Bekasi	5.611	5.828	11.439
17	Kab. Bandung Barat	3.835	4.469	8.304
18	Kab. Pangandaran	1.1910	1.893	3.803
19	Kota Bogor	6.754	9.532	16.286
20	Kota Sukabumi	3.578	3.730	7.308
21	Kota Bandung	1.874	2.007	3.881
22	Kota Cirebon	2.312	2.728	5.040
23	Kota Bekasi	4.843	6.294	11.137
24	Kota Depok	2.825	4.057	6.882
25	Kota Cimahi	1.855	2.790	4.645
26	Kota Tasikmalaya	3.198	3.992	7.190
27	Kota Banjar	1.363	1.470	2.833
28	PROVINSI JAWA BARAT	20.841	17.345	38.186
	TOTAL	153.933	162.047	315.980

(Sumber : Jawa Barat Dalam Angka, 2019).

Tabel 2.3 menunjukkan distribusi jumlah PNS di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018, baik berdasarkan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Kabupaten Kuningan mencatat jumlah PNS tertinggi dengan total 17.321

orang, diikuti oleh Kabupaten Bogor dengan 17.286 PNS. Sebaliknya, Kota Banjar memiliki jumlah PNS terkecil, hanya sebanyak 2.833 orang. Data ini memberikan gambaran mengenai sebaran PNSN di Jawa Barat, yang memperlihatkan adanya perbedaan yang signifikan antara wilayah dengan jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan PNS yang beragam.

Jumlah PNS yang cukup tinggi di beberapa kabupaten/kota besar, seperti Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor, dapat mengindikasikan tingkat kebutuhan pelayanan publik yang lebih besar di daerah-daerah tersebut, seiring dengan populasi dan kompleksitas administratif yang lebih tinggi. Sebaliknya, daerah dengan populasi lebih kecil seperti Kota Banjar memiliki kebutuhan PNS yang lebih rendah, sesuai dengan skala dan kapasitas wilayah administratifnya.

**Tabel 2.5 Jumlah PNS menurut Golongan/Kepangkatan/Ruang
di Provinsi Jawa Barat 2018**

GOLONGAN/ KEPANGKATAN/RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
GOLONGAN I			
I/A (Juru Muda)	36	4	40
I/B (Juru Muda Tingkat I)	349	20	369
I/C (Juru)	1.206	46	1.252
I/D (Juru Tingkat I)	1.358	59	1.417
GOLONGAN II			
II/A (Pengatur Muda)	3.398	598	3.996
II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	6.254	1.844	8.098
II/C (Pengatur)	13.706	6.804	20.510
II/D (Pengatur Tingkat I)	6.717	3.423	10.140
GOLONGAN III			
III/A (Penata Muda)	14.059	18.040	32.099
III/B (Penata Muda Tingkat I)	18.230	23.570	41.800
III/C (Penata)	17.166	20.279	37.445

III/D (Penata Tingkat I)	17.496	19.701	37.197
GOLONGAN IV			
IV/A (Pembina Muda)	28.031	34.546	62.577
IV/B (Pembina Muda Tingkat I)	24.085	32.144	56.229
IV/C (Pembina)	1.671	869	2.540
IV/D (Pembina Tingkat I)	134	82	216
IV/E (Pembina Utama)	37	18	55
TOTAL	153.933	162.047	315.980

(Sumber : Jawa Barat Dalam Angka, 2019)

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 2.4, distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 148.541 orang, diikuti oleh golongan IV dengan total 121.617 orang. PNS dari kedua golongan ini menempati posisi strategis dalam struktur birokrasi yang meliputi: pelaksanaan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan pelayanan publik. Jumlah PNS yang signifikan di golongan III/A dan III/B, masing-masing sebanyak 32.099 dan 41.800 orang, menunjukkan bahwa PNS di Jawa Barat telah mencapai level pendidikan dan pengalaman yang cukup tinggi, terutama untuk posisi Penata Muda dan Penata Muda Tingkat I. Demikian pula, di golongan IV, sebanyak 62.577 ASN berada di tingkat Pembina Muda (IV/A) dan 56.229 orang di tingkat Pembina Muda Tingkat I (IV/B). Data tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah PNS perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki di hampir semua golongan, yang mencerminkan peningkatan partisipasi perempuan dalam birokrasi pemerintahan di Jawa Barat. Sementara itu, golongan I dan II yang umumnya diisi oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan yang lebih rendah, memiliki jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan golongan III dan IV. Hal ini mencerminkan bahwa banyak PNS yang menduduki posisi kepemimpinan penting dalam birokrasi pemerintahan. Posisi-posisi ini tidak hanya

penting dalam menjalankan fungsi administrasi, tetapi juga berperan dalam kebijakan strategis yang berpengaruh langsung terhadap layanan publik di tingkat lokal maupun regional.

**Tabel 2.6 Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan
di Provinsi Jawa Barat 2018**

TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Sekolah Dasar	2.136	48	2.184
SLTP	3.660	170	3.830
SLTP Kejuruan	87	4	91
SLTA	30.761	11.192	41.953
SLTA Kejuruan	3.151	1.607	4.758
SLTA Keguruan	27	1	28
Diploma I	430	842	1.272
Diploma II	7.944	12.235	20.179
Diploma III/Sarjana Muda	6.879	16.945	23.824
Diploma IV	1.083	2.690	3.773
S-1/Sarjana	82.213	105.634	187.847
S-2	15.352	10.594	25.946
S-3	210	85	295
TOTAL	153.933	162.047	315.980

(Sumber : Jawa Barat Dalam Angka, 2019)

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 2.6, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 mencapai 315.980 orang dengan distribusi gender sebanyak 153.933 laki-laki dan 162.047 perempuan. Secara umum, tingkat pendidikan PNS didominasi oleh lulusan S-1/Sarjana yang mencakup 187.847 orang (82.213 laki-laki dan 105.634 perempuan). Sebagian besar PNS dengan pendidikan menengah terdapat pada jenjang SLTA, baik umum maupun kejuruan dengan total 46.711 orang. Di sisi lain, hanya 2.184 orang PNS memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar, menunjukkan pergeseran ke arah kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi. Untuk jenjang

pendidikan lanjutan terdapat 25.946 PNS dengan gelar S-2 dan 295 PNS dengan gelar S-3, hal ini mencerminkan komitmen terhadap pengembangan kapasitas keilmuan dalam birokrasi. Perbandingan berdasarkan gender menunjukkan bahwa perempuan mendominasi pada sebagian besar jenjang pendidikan, khususnya Diploma II hingga Strata-1.

2.4 Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Pilgub pada tanggal 27 Juni 2018 yang merupakan pemilihan kepala daerah ketiga di wilayah tersebut dengan sistem pemungutan suara secara langsung. Pemilihan ini awalnya dijadwalkan pada 24 Februari namun ditunda untuk menyesuaikan dengan jadwal pilkada serentak gelombang ketiga di bulan Juni. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya partai politik yang memiliki setidaknya 20 kursi di DPRD Jawa Barat yang diperbolehkan untuk mencalonkan kandidat. Sementara itu, partai politik yang memiliki kursi di bawah jumlah tersebut dapat mencalonkan kandidat hanya setelah mendapatkan dukungan dari partai lain.

Pilgub Jabar tahun 2018 menjadi objek penelitian yang menarik karena provinsi ini memiliki sekitar 48,68 juta pemilih potensial, menjadikannya sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pemilih tertinggi di Indonesia. Hal ini menambah nilai penting bagi partai politik dan elit politik yang berusaha meraih kemenangan dalam pemilihan regional. Kemenangan di Jawa Barat dianggap strategis, terutama dalam konteks pemilihan nasional yang diadakan bersamaan pada tahun 2019 provinsi ini menjadi kunci dalam perebutan kursi kepresidenan.

**Tabel 2.7 Kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Barat Tahun 2018**

NOMOR URUT	CALON GUBENUR DAN WAKIL GUBENUR		PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI DPRD	JARGON
1			Pengusung: • PPP • PKB • NASDEM • HANURA Pendukung: • PSI • BERKARYA	24/100	RINDU JABAR JUARA
	Mochammad Ridwan Kamil (Non-Partai)	Uu Ruzhanul Ulum (Kader PPP)			
	Wali Kota Bandung (2013-2018)	Bupati Tasikmalaya (2011-2021)			
2			Pengusung: • PDI-P	20/100	HASANAH
	Tubagus Hasanudin (Kader PDI-P)	Anton Charliyan (Kader PDI-P)			
	Wakil Ketua Komisi I DPR-RI (2014-2018)	Kapolda Jawa Barat (2016-2017)			

3			Pengusung: • GERINDRA • PKS • PAN Pendukung: • PBB • IDAMAN	27/100	ASYIK
	Sudrajat (Kader Gerindra)	Ahmad Syaikh (Kader PKS)			
	Purnawirana TNI-AD (2005)	Wakil Wali Kota Bekasi (2013-2018)			
4			Pengusung: • DEMOKRAT • GOLKAR Pendukung: • PERINDO • PKPI	29/100	2DM
	Dedi Mizwar (Kader Demokrat)	Dedi Mulyadi (Kader Golkar)			
	Wakil Gubernur Jawa Barat (2013-2018)	Bupati Purwakarta (2008-2018)			

(Sumber : KPU Jawa Barat, 2018).

Terdapat empat pasangan kandidat yang bersaing. Pasangan nomor urut satu adalah Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum; nomor urut dua adalah Tubagus Hasanuddin dan Anton Charliyan; nomor urut tiga adalah Sudrajat dan Ahmad Syaikh; dan pasangan nomor urut empat adalah Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi. Persaingan antara pasangan kandidat ini menciptakan dinamika politik yang menarik, mengingat Jawa Barat merupakan provinsi dengan potensi suara terbesar yang dapat memengaruhi hasil pemilihan di tingkat nasional.

Kemenangan di provinsi ini dipandang strategis, tidak hanya untuk jabatan gubernur, tetapi juga sebagai langkah awal dalam persaingan politik nasional yang terjadi pada tahun 2019, pemilihan presiden juga dilaksanakan. Dalam konteks ini, interaksi antara strategi kampanye, dukungan masyarakat, dan kebijakan publik memainkan peran penting, karena dapat menentukan siapa yang berhasil meraih simpati pemilih dan, pada gilirannya, memengaruhi arah kebijakan di tingkat nasional.

Tabel 2.8 Hasil Perolehan Suara Pilgub Jabar 2018

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	PRESENTASE (%)
1.	Ridwan Kamil – Uu Rizhanul Ulum (RINDU)	7.226.254	32,88 %
2.	Sudrajat-Ahmad Syaikh (ASYIK)	6.317.465	28,74 %

3.	Dedy Mizwar-Dedi Mulyadi (2DM)	5.663.198	25,77 %
4.	Hasanudin-Anton (HASANAH)	2.773.078	12.62%

(Sumber: KPU Jawa Barat, 2018).

Pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum berhasil memenangkan Pilgub Jabar 2018 dengan perolehan suara sebanyak 7.226.254 atau 32,88%. Kemenangan ini menegaskan popularitas Ridwan Kamil yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Bandung serta kepercayaan publik terhadap Uu Ruzhanul Ulum yang dikenal sebagai tokoh pesantren. Keberhasilan kampanye keduanya dianggap sebagai kombinasi strategi politik yang efektif dan dukungan kuat dari berbagai elemen masyarakat, terutama di kalangan pemilih muda dan komunitas agama. Kemenangan ini mencerminkan keinginan masyarakat Jawa Barat akan perubahan yang lebih progresif dan inovatif dalam tata kelola pemerintahan di provinsi ini. Dengan dukungan suara yang signifikan, pasangan ini diharapkan mampu mewujudkan aspirasi publik dan membawa Jawa Barat menuju perkembangan yang lebih baik di berbagai sektor.

Selain kemenangan pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum, hasil Pilgub Jawa Barat 2018 juga menunjukkan persaingan yang ketat di antara kandidat lainnya. Pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhul dengan jargon *ASYIK* berhasil memperoleh 6.317.465 suara atau 28,74%, menempati posisi kedua. Perolehan suara yang tinggi ini

mencerminkan adanya dukungan signifikan dari kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan dengan pendekatan yang lebih konservatif dan religius. Sementara itu, pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi dengan jargon *2DM* meraih 5.663.198 suara atau 25,77%, menempati posisi ketiga. Meskipun tidak berhasil memenangkan pemilihan, perolehan suara ini menunjukkan kekuatan jaringan politik di wilayah pedesaan dan urban yang dipimpin oleh dua tokoh dengan pengalaman birokrasi dan pemerintahan yang panjang. Di sisi lain, pasangan Tubagus Hasanudin dan Anton Charliyan yang diusung oleh PDI-P harus puas berada di posisi terakhir dengan 2.773.078 suara atau 12,62%, menegaskan bahwa dukungan partai besar tidak selalu menjadi jaminan kemenangan jika tidak disertai strategi kampanye yang efektif.